

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan rangkaian penelitian yang telah dilakukan mengenai kerja sama Indonesia–Jepang dalam menangani konflik sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI), dapat disimpulkan bahwa dinamika ketenagakerjaan transnasional ini digerakkan oleh adanya interdependensi strategis yang bersifat asimetris. Di satu sisi, Jepang dihadapkan pada krisis demografi akut berupa fenomena penuaan populasi (*kōreika shakai*) dan kelangkaan tenaga kerja (*rōdōryoku busoku*), sementara di sisi lain, Indonesia memiliki kelimpahan bonus demografi yang membutuhkan penyerapan pasar kerja secara masif. Namun, ketika kepentingan makro ekonomi ini diimplementasikan di tingkat mikro ruang produksi, ketimpangan posisi dalam struktur pasar kerja sekunder tidak dapat dihindarkan. PMI secara sistemik ditempatkan pada lapisan bawah dengan beban pekerjaan 3D (*Dirty, Dangerous, Demanding* atau *Kitsui, Kitanai, Kiken*), yang diperparah oleh kekakuan instrumen kontrol imigrasi berupa izin tinggal (*zairyū shikaku*) dalam skema pemagangan (*Gino Jisshū Seido*). Keterikatan status visa ini pada satu perusahaan sponsor membatasi mobilitas tenaga kerja, memperlemah posisi tawar pekerja di hadapan pemberi kerja Jepang, serta melahirkan subordinasi struktural yang rentan menciptakan konflik laten di lingkungan industri.

Melalui perspektif teori konflik struktural yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Ralf Dahrendorf, friksi sosial di dunia kerja Jepang terbukti tidak lahir dari kegagalan adaptasi sosiokultural individu pekerja atau persoalan perilaku semata, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari ketimpangan distribusi otoritas dan relasi kuasa di dalam desain sistem kerja itu sendiri. Manifestasi dari tekanan struktural ini terlihat jelas dalam studi kasus kriminalitas Rohmat Hidayat di Fukuoka pada Juli 2024, di mana aksi menyimpang tersebut merupakan ledakan dari konflik laten akibat jeratan utang (*debt bondage*) pra-keberangkatan

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

di hulu yang gagal dimitigasi oleh sistem penempatan. Ketika lembaga pengawas di hilir (Kumiai) gagal menjalankan fungsi penanganan keluhannya (Kujō shori kinō) secara aktif dan adaptif untuk mereduksi beban ekonomi pekerja, tekanan finansial dan psikologis tersebut mendorong terjadinya konflik terbuka di lapangan. Kendati demikian, dalam kerangka teori kerja sama bilateral K.J. Holsti, rentetan sengketa ketenagakerjaan ini dikategorikan sebagai managed conflict yang berada dalam batas ranah low politics. Isu-isu tersebut tidak menyentuh kedaulatan fisik negara sehingga dapat dikelola dan diselesaikan secara efektif melalui saluran diplomasi fungsional-pragmatis non-konfrontatif, yang membuat stabilitas kemitraan strategis kedua negara di tingkat makro tetap bertahan kokoh.

Sebagai resolusi jangka panjang untuk menutup celah kelembagaan (*institutional gap*) tersebut, kerja sama kedua negara telah bertransaksi menuju tata kelola transnasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkeadilan melalui penguatan institusi hulu ke hilir. Di sisi hulu, BP2MI melakukan intervensi preventif melalui digitalisasi satu pintu (SiskoP2MI), fasilitasi jalur mandiri (E-ID), serta pengetatan acuan biaya penempatan berdasarkan Peraturan No. 7 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala BP2MI No. 48 Tahun 2023 guna memberantas eksploitasi biaya oleh lembaga informal yang menjadi akar dari jeratan utang. Sementara di sisi hilir, reformasi kebijakan diwujudkan melalui implementasi skema *Specified Skilled Worker (SSW)* yang memberikan fleksibilitas hukum bagi pekerja untuk berpindah perusahaan (*tenshoku*), didukung koordinasi aktif antara Kumiai dan Japan Pension Service dalam mencairkan dana repatriasi sebagai katup pengaman finansial bagi pekerja purna-deportasi.

Raphael Juanorman Pasaribu, 2026

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGANI KONFLIK
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]